

## **ABSTRAK**

Pratissa Prisela Azura (01656200051)

### **PERAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA TERHADAP PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGHADAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

(xii + 140 halaman)

Jabatan Notaris sangat berhubungan dengan data pribadi penghadap yang tercantum dalam akta. Notaris wajib merahasiakan isi akta yaitu data pribadi para penghadap dan saksi, Jika membandingkan ketentuan GDPR dengan Peraturan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, masih belum dapat menjamin terciptanya perlindungan data pribadi sebagaimana GDPR kehendaki. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah Bagaimana Peran Notaris terhadap Pelindungan Data Pribadi Penghadap yang diduga palsu dikaitkan dengan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan dan Bagaimana Perbandingan Hukum Pelindungan Data Pribadi dalam Kerangka Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan dan GDPR. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan jenis data sekunder, studi kepustakaan dan analisis data kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Notaris bukan pihak yang menilai keaslian dan bukan pihak yang bertanggung jawab terhadap data pribadi penghadap (KTP-el) sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973. Notaris tidak termasuk dalam kategori pengguna. Terhadap KTP-el yang diduga palsu, Notaris harus diberikan hak akses data kependudukan, dengan wajib merahasiakan isi akta dan menjalankan prinsip kehati-hatian. Perbandingan antara UUAK dan GDPR dilihat dari definisi data pribadi, perolehan dan penyimpanan data, para pihak yang bertanggung jawab, perbandingan hak, penerapan sanksi. Melihat perbandingan yang unggul dari GDPR sudah seharusnya Pemerintah mengevaluasi serta mengesahkan Undang-Undang khusus tentang perlindungan data pribadi di Indonesia.

Referensi : 59 (1978-2022)

Kata Kunci : Notaris, Kerahasiaan Jabatan, Pelindungan Data Pribadi

## ABSTRACT

Pratissa Prisela Azura (01656200051)

### **THE ROLE OF THE NOTARY IN PERFORMING ITS POSITION ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA WITH RESPECTIVE IN RELATED TO THE LAW CONCERNING POPULATION ADMINISTRATION**

(xii + 140 pages)

*The position of a Notary is closely related to the personal data of the appearer listed in the deed. The notary is obliged to keep the contents of the deed confidential, namely the personal data of the appearers and witnesses, the notary's role is not to disseminate it. Compare the provisions of the GDPR with the provisions of the Law on Population Administration, it is still not possible to guarantee the creation of personal data protection as the GDPR wants. The formulation of the problem in this thesis is how the role of a notary in the protection of personal data for alleged fraudulent witnesses is related to the law on population administration and how the law on personal data protection compares in the framework of the law on population administration and GDPR. This research uses normative juridical, with secondary data types, literature study and qualitative data analysis. This research can be concluded that the Notary is not the party that assesses the authenticity and is not the party responsible for the personal data of the appearer (e-KTP-) as stated in the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 702 K/Sip/1973. Notaries are not included in the category of users. For an e-KTP suspected of being fake, a Notary must be granted access to population data, with the obligation to keep the contents of the deed confidential and apply the precautionary principle. The comparison between UUAK and GDPR can be seen from the definition of personal data, data acquisition and storage, responsible parties, comparison of rights, application of sanctions. Seeing the superior comparison of GDPR, the Government should evaluate and pass a special law on the protection of personal data in Indonesia.*

References : 59 (1978-2022)

Keywords : Notary, Confidentiality Position, Personal Data Protection